

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Artikel

Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan
Titiek Kartika Hendrastiti

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia
Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota
Akhmad Misbahul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia
Aditya Perdana dan Delia Wildianti

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi
Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata

Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah
Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo

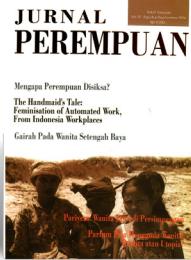
Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT
Anita Dhewy dan Bella Sandiata

Diterbitkan oleh:



Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan



Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.

Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroplah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminism. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan mengimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

- **Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia**

No. Rekening 127-00-2507969-8

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org

Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Dr. Atnike Nova Sigiyo

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M.Si.

DEWAN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiyo (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

EDITOR TAMU

Astutik Supraptini, M.A. (Program MAMPU)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M Santoso (Gender, Sosiologi & Media, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Hukum & Gender, Universitas Indonesia)

Fransicia Saveria Sika Ery Seda, Ph.D. (Sosiologi, Gender & Kemiskinan, Universitas Indonesia)

Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sejarah, Gender & Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)

Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi, M.Si.

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.

REDAKSI

Bella Sandiata, M.H.

Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah

Gery Andri Wibowo

Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp./Fax (021) 2270 1689

E-mail: yjp@jurnalperempuan.com

redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Februari 2019

MAMPU | Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia / *Indonesian Feminists' Discourse and Politics* iii

Artikel

- Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan / *Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty* 1-12
Titiek Kartika Hendrastiti
- Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia / *Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia* 13-26
Anne Lockley, Lies Marcoes, Kharisma Nugroho & Abby Gina
- Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota / *Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City* 27-42
Akhmad Misbakhul Hasan, Betta Anugrah & Andi Misbahul Pratiwi
- Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia / *Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia* 43-52
Aditya Perdana dan Delia Wildianti
- Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi / *Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces* 53-65
Retno Agustin, Indriyati Suparno, Samsidar & Bella Sandiata
- Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah / *Women's Role in Central Java Agriculture: A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association* 67-76
Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo
- Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT / *Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence* 77-87
Anita Dhewy dan Bella Sandiata

JP edisi ini diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dengan dukungan dari Kemitraan Australian-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia ke layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia

Indonesian Feminists' Discourse and Politics

Reformasi politik pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan pada situasi politik di Indonesia, setidaknya dari sistem otoriter menuju demokrasi, dari sistem pemerintahan yang tersentralisasi menjadi terdesentralisasi, dan dari supremasi militer ke supremasi sipil. Perubahan ini membawa implikasi bagi gerakan sosial politik di Indonesia termasuk gerakan perempuan.

Gerakan perempuan Indonesia turut terlibat dan menjadi bagian penting dalam perjuangan reformasi. Lebih jauh gerakan perempuan bahkan membawa budaya politik baru yang berlandaskan pada etika kepedulian di tengah budaya politik yang maskulin. Hal ini tampak pada tindakan dan strategi yang diambil gerakan perempuan dalam menghadapi kerusuhan Mei 1998 dan konflik sosial dengan menggunakan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) di berbagai daerah.

Dalam udara reformasi, gerakan perempuan Indonesia juga menawarkan diskursus baru yang mendobrak pemisahan antara privat dan publik. Diskursus ini diwujudkan dalam kebijakan pro perempuan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di tahun 2004. Gerakan perempuan Indonesia juga telah memasukkan perumusan perempuan ke dalam agenda perpolitikan. Hal ini terlihat pada lahirnya kebijakan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik sejak tahun 2002. Di tataran kebijakan sejumlah undang-undang yang pro perempuan sudah disahkan meskipun dalam implementasinya masih kurang dan banyak catatan.

Singkatnya, setelah 20 tahun reformasi gerakan dan pemikiran perempuan terus berkembang. Perkembangan gerakan perempuan tersebut dapat dilihat dari kemunculan berbagai organisasi yang didirikan untuk menyuarakan dan membela kepentingan perempuan dalam berbagai isu, seperti keragaman identitas gender, disabilitas, perempuan adat, perempuan buruh migran, pekerja rumah tangga, dan masih banyak lagi.

Namun, dua puluh tahun sejak reformasi dicetuskan, persoalan mendasar yang telah diperjuangkan sejak

dulu masih dihadapi oleh kaum perempuan. Hingga kini kaum perempuan masih menghadapi persoalan mendasar seperti angka kematian ibu, perkawinan anak, perdagangan manusia, dan kesenjangan upah. Persoalan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan gender masih terus berlanjut, seperti perkosaan dan pelecehan seksual, juga persekusi terhadap LGBT.

Perjuangan gerakan perempuan belum selesai hanya dengan munculnya berbagai peraturan dan kebijakan yang mengakomodasi ketidakadilan gender. Dalam udara reformasi juga memberikan ruang bagi munculnya konservatisme berbasis agama dan puritanisme yang melakukan kontrol dan pembatasan terhadap perempuan. Negara semakin memfasilitasi kecenderungan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan lewat peraturan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal.

Dalam situasi tersebut, gerakan perempuan terus mencari bentuk dan pemikiran untuk mendorong agenda politik perempuan di ranah publik, mulai dari tingkat nasional hingga di akar rumput. Aksi kolektif perempuan adalah salah satu metode gerakan perempuan yang bertujuan untuk mengajukan tuntutan di ranah publik dengan tetap membawa identitas gender perempuan. Gerakan perempuan pun tak berhenti pada persoalan perempuan, tetapi juga merambah persoalan publik yang lebih luas, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Artikel-artikel dalam Jurnal Perempuan edisi ini memperlihatkan upaya pemikiran dan gerakan perempuan untuk berjuang dalam berbagai ranah dan isu. Mulai dari gerakan basis di akar rumput hingga gerakan advokasi di level kebijakan. Mulai dari lingkup kecil di tataran desa hingga skala nasional.

Semua tindakan kolektif yang melibatkan aktor kolektif dan diskursus gender tersebut menegaskan gerakan perempuan punya dampak dan daya dorong bagi perubahan sosial yang penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga komunitas, pemerintah, dan masyarakat secara luas. (**Anita Dhewy**)

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Titiek Kartika Hendrastiti (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia)

Tutur Perempuan Komunitas Anti Tambang di Sumba: Sebuah Narasi Gerakan Subaltern untuk Kedaulatan Pangan

Oral Story of Women's Anti-mining Group in Sumba: A Narrative of Subaltern Movement for Food Sovereignty

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 1-12, 1 tabel, 2 gambar, 15 daftar pustaka

This article analyzes the meaning of the anti-gold mining group oral story from Praikaroku Jangga Village, Central Sumba Regency, East Nusa Tenggara. This documentation is important to record the dynamics of the history of local women's movements in the post-reformation era Indonesia in 1998. This study uses a postcolonial feminist ethnographic approach. The female anti-gold mine forces identify as a subaltern movement, whose struggle goes beyond practicality rejecting the gold mining corporation operations. Their speeches about the movement show that the direction of their resistance leads to food independence and sovereignty from extractive business aggression. To maintain their space of life, the women's forces were only connected by words of experience and knowledge of adat and tradition. Postcolonial feminist ethnography explains the dis/interconnectivity between the interests of the state, political economic power, local-national-global. The construction of this anti-mining women's discourse shows the strength of women as agents in caring for natural resources.

Keywords: Central Sumba women's movement, food sovereignty, postcolonial feminist ethnography, subaltern, women's agency

Artikel ini menganalisis makna tutur komunitas anti tambang emas dari Desa Praikaroku Jangga, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Pendokumentasian ini penting guna mencatat salah satu dinamika sejarah pergerakan perempuan lokal di Indonesia pasca Reformasi 1998. Studi ini menggunakan pendekatan etnografi feminis pascakolonial, yang analisisnya menggunakan pisau feminis pascakolonial. Pasukan perempuan anti tambang emas memiliki identitas sebagai gerakan subaltern, yang perjuangannya melampaui praksis menolak operasi korporasi tambang emas. Tutur mereka tentang gerakan menunjukkan bahwa arah perlawanan mereka menuju pada kemandirian dan kedaulatan pangan dari agresi bisnis ekstraktif. Untuk mempertahankan ruang hidupnya, pasukan perempuan tersebut hanya terhubung oleh tutur pengalaman dan pengetahuan adat dan tradisi. Etnografi feminis pascakolonial menjelaskan dis/interkonektivitas antara kepentingan negara, kekuatan ekonomi politik, lokal nasional global. Konstruksi diskursus perempuan anti tambang ini memperlihatkan kekuatan perempuan sebagai agen dalam merawat sumber daya alam.

Kata kunci: gerakan perempuan Sumba Tengah, kedaulatan pangan, etnografi feminis pascakolonial, subaltern, keagenan perempuan

Anne Lockley¹, Lies Marcoes¹, Kharisma Nugroho¹ & Abby Gina²
(¹Migunani, Yogyakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia

Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 13-26, 7 tabel, 1 gambar, 6 daftar pustaka

Women's collective action has been used by women's group in Indonesia since early 20th century. The collective action of women in this study is defined as the formal or informal formation and activity of groups or networks of predominantly women that aim to bring about positive changes in women's lives. Eight case studies of women's collective actions discussed in this study reveal variety of backgrounds, motives and agencies in those collective actions. This variety exist due to the different and specific conditions and needs of each of the women's groups. The object of the study in this research were eight collective actions, namely: Balai Sakinah'Aisyiyah (BSA), Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Parepare branch, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center, and Posko Lestari and Posko Mentari. The data of the research were collected through document review, surveys, and in-depth interviews. This research finds that the involvement of women in collective actions stem from gender inequality that they experience in their daily lives. Through the collective actions the women were empowered to strengthen their access to social services and legal protection. This research also finds there were growing understanding about the concept of gender inequality among the women who involved in the collective actions.

Keywords: women's collective action, empowerment, gender inequality, participation

Aksi kolektif perempuan telah banyak dilakukan oleh berbagai kelompok di berbagai wilayah di Indonesia sejak awal abad ke-20. Aksi kolektif perempuan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pembentukan dan aktivitas formal maupun informal dari kelompok atau jejaring para perempuan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan perempuan. Delapan studi kasus aksi kolektif perempuan yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan keragaman latar belakang, motif dan agen dalam aksi-aksi kolektif. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi dan kebutuhan tiap kelompok perempuan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah delapan aksi kolektif di Balai Sakinah'Aisyiyah, Serikat PEKKA, Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Parepare, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center dan Posko Lestari dan Mentari. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa ketidakadilan gender merupakan faktor yang mendorong keterlibatan para perempuan di dalam aksi kolektif. Melalui aksi kolektif para perempuan dapat memperkuat akses mereka terhadap layanan sosial dan perlindungan hukum. Melalui aksi kolektif juga ditemukan tumbuhnya pemahaman tentang ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan.

Kata kunci: aksi kolektif perempuan, pemberdayaan, ketimpangan gender, keterlibatan

Akhmad Misbakhul Hasan¹, Betta Anugrah¹ & Andi Misbahul Pratiwi² (¹Seknas FITRA, Jakarta, Indonesia; ²Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Analisis Anggaran Responsif Gender pada Program Perlindungan Sosial di Indonesia: Studi Kasus di Dua Kabupaten dan Kota

Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 27-42, 2 tabel, 6 grafik, 16 daftar pustaka

Presidential Instruction (Inpres) No. 9 of 2000 about Gender Mainstreaming is a mechanism to in National Development has impacts on the planning and implementation of public policy in Indonesia. Public policy becomes an important arena for the struggle to realize gender equality and justice. One of the government's commitments to this matter can be seen through Gender-Responsive Budgeting (GRB). This study analyses gender responsive budgeting in social protection programs in Indonesia, with case studies in three regions, namely Gunungkidul Regency, North Lombok Regency, and Padang City. Data collection is carried out by in-depth interviews and literature studies, including the Indonesian Budget and Regional Government Budget documents. This study conducted GRB analysis in three regions with three categories of budget expenditure analysis, namely specifically identified gender-based expenditure, equal employment opportunity expenditure, and mainstream budget expenditure. The results of the study show that in several regions there have been gender-responsive specific budget allocations for affirmation programs for women, children, the elderly, and dissability. However, it can be seen that the budget and gender-specific expenditure are still centralized in services that are identical to women's affairs, and not yet mainstreamed in all of the budget allocation.

Keywords: Gender-Responsive Budget, Social Protection Program, Gunungkidul District, North Lombok District, Padang City, Budget Analysis

Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional memiliki dampak terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia. Kebijakan publik menjadi arena penting bagi perjuangan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Komitmen pemerintah terhadap hal tersebut salah satunya dapat dilihat melalui Anggaran Responsif Gender (ARG). Penelitian ini menganalisis anggaran responsif gender pada program perlindungan sosial di Indonesia, dengan studi kasus di tiga wilayah yaitu, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan, termasuk dokumen APBN dan APBD. Penelitian ini melakukan analisis ARG di tiga wilayah tersebut menggunakan tiga kategori analisis belanja anggaran yaitu, specifically identified gender based-expenditure, equal employment opportunity expenditure, and mainstream budget expenditure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa daerah telah ada alokasi anggaran responsif gender untuk program afirmasi perempuan, anak, orang lanjut usia (lansia) dan difabel. Meski demikian, terlihat bahwa anggaran dan pengeluaran belanja spesifik-gender masih terpusat di dinas-dinas yang identik dengan urusan perempuan dan tidak menjadi arus utama dalam alokasi anggaran program perlindungan sosial.

Kata kunci: Anggaran Responsif Gender, Program Perlindungan Sosial, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Lombok Utara, Kota Padang, Analisis Anggaran Belanja

Aditya Perdana dan Delia Wildianti (PUSKAPOL LP2SP FISIP Universitas Indonesia, Depok, Indonesia)

Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia

Women Political Movements After 20 Years of Reformasi in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 43-52, 1 tabel, 21 daftar pustaka

This article raises the important question of the achievements of women political movements after 20 years of reformasi in Indonesia. This article intends to elaborate on two main issues, namely the reasons underlying the women's political movement, which has stagnated, and the offer of a strategy that needs to be discussed to attract young women to politics. There are three main issues that are important concerns in the women's political movement after the 1998 Reformation. First, the character of civil society organizations and political parties in Indonesia has its own peculiarities. Second, there is a space of political interaction that has been sufficiently built between political parties and groups of NGOs and women's organizations. Third, in electoral competitions, one of the important issues that still need to be explored further is the effort to win female candidates and regional head candidates so that the number of women's representation can be achieved. Connectivity between millennials and political parties needs to be an important means to be carried out in the near future when parties feel the need for nominating women and their victory must be immediately overcome.

Keywords: gender and politics, elections, women's political representation

Pertanyaan penting yang diajukan artikel ini adalah bagaimana capaian gerakan perempuan politik pasca 20 tahun reformasi di Indonesia? Artikel ini hendak mengelaborasi dua hal utama yaitu alasan yang mendasari gerakan politik perempuan mengalami stagnasi dan menawarkan strategi yang perlu diperbincangkan guna menarik anak muda perempuan untuk berpolitik. Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian penting dalam gerakan politik perempuan pasca Reformasi 1998. Pertama, karakter organisasi masyarakat sipil dan partai politik di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri. Kedua, ada ruang interaksi politik yang sudah terbangun dengan cukup memadai antara partai politik dengan kelompok LSM dan ormas perempuan. Ketiga, dalam kompetisi elektoral di pemilu, salah satu persoalan penting yang masih perlu didalami lebih lanjut adalah usaha memenangkan caleg perempuan dan calon kepala daerah agar jumlah keterwakilan perempuan dapat tercapai. Konektivitas antara generasi milenial dengan partai politik perlu menjadi sarana yang penting untuk dilakukan dalam waktu dekat manakala partai merasa kebutuhan pencalonan perempuan dan kemenangannya harus segera diatasi.

kata kunci: gender and politics, pemilu, keterwakilan politik perempuan

Retno Agustin, Indriyati Suparno¹, Samsidar² & Bella Sandiata³ (¹KOMNAS Perempuan, Jakarta, Indonesia; ²Forum Pengada Layanan, Indonesia; ³Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Keterpaduan Layanan yang Memberdayakan: Hasil Asesmen P2TP2A di 16 Provinsi

Integrated Service for Empowerment: The Assessment of P2TP2A in 16 Provinces

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 53-65, 2 tabel, 5 Grafik, 8 daftar pustaka

The increasing number of violence against women every year raises question about the effectiveness of integrated service programs for the women victims of violence. The government established the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in 2002 supported by National Commission on Violence against Women (KOMNAS Perempuan) in the effort to provide protection and empowerment of women victims of violence. However, the increasingly diverse forms of violence against women have resulted in complex needs of the victims. The question arises whether the function and performance role of P2TP2A has fully answered the needs of victims or not. This article focuses on assessments conducted by KOMNAS Perempuan and Forum Pengada Layanan (FPL) in 16 provinces to re-examine the role of P2TP2A's functions and performance in meeting the needs of victims. Based on the findings of the assessment, there are still shortcomings in the system and performance of P2TP2A in providing victims' needs, such as lack of awareness as service providers, coordination problems among institutions and limited budget. This assessment uses in-depth interviews and document studies, by including the lessons from the P2TP2A Surakarta city, Bandung district and Central Java Province.

Keywords: P2TP2A, victims, integrated service, violence against women

Angka kekerasan terhadap perempuan yang masih terus meningkat dari tahun ke tahun menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dari program penanganan bagi perempuan korban kekerasan. Pemerintah telah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2002 yang turut didukung Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan). P2TP2A didirikan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan korban kekerasan. Namun, bentuk kekerasan yang semakin beragam mengakibatkan kebutuhan perempuan korban semakin kompleks. Artikel ini berfokus pada asesmen yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) di 16 provinsi untuk memeriksa kembali peran fungsi dan kinerja P2TP2A dalam memenuhi kebutuhan korban. Berdasarkan temuan asesmen, masih terdapat kekurangan dari sistem dan kinerja P2TP2A dalam memberikan layanan kepada perempuan korban, seperti kurangnya kesadaran sebagai penyedia layanan, adanya masalah koordinasi antarlembaga, hingga anggaran yang terbatas. Asesmen ini menggunakan metode wawancara mendalam dan studi dokumen dengan menyertakan pembelajaran dari P2TP2A Kota Surakarta, Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Tengah.

Kata kunci: P2TP2A, perempuan korban, layanan terpadu, kekerasan terhadap perempuan

Linda Susilowati dan Petsy Jessy Ismoyo (Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia)

Peran Perempuan dalam Pertanian di Jawa Tengah: Studi Kasus Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah

Women's Role in Central Java Agriculture:A Case Study on Qaryah Thayyibah Peasants Association

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 67-76, 18 daftar pustaka

This research proves the importance of the role of women in the agricultural sector in Central Java through a case study of the Peasants Union Society movement in Qaryah Thayyibah, Salatiga, Central Java. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through literature studies, observations, FGDs and in-depth interviews. The analysis technique uses categorization, interpretation and conclusions from the results of data collection. This research shows that women have a key role in the development of the agricultural sector. Therefore SPPQT's programs for empowering female farmers include: (1) women's political education, (2) involvement of women in the Production Assembly and Peasants' Association, (3) Women's involvement in the Village Development Council (Team 11). The findings

also show obstacles to community resistance for the third point. This can be overcome again by SPPQT's vision, gender equality needs to be seen as a solution to improve the agricultural sector.

Keywords: the role of women, farmer groups, marginalization

Penelitian ini membuktikan pentingnya peran perempuan dalam sektor pertanian di Jawa Tengah lewat studi kasus gerakan Serikat Paguyuban Petani di Qaryah Thayyibah, Salatiga, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, FGD dan wawancara mendalam. Teknik analisis menggunakan kategorisasi, interpretasi dan kesimpulan dari hasil pengumpulan data. Penelitian ini memperlihatkan perempuan mempunyai peran kunci dalam pembangunan sektor pertanian. Oleh karena itu program yang dijalankan SPPQT untuk pemberdayaan perempuan petani meliputi: (1) pendidikan politik perempuan, (2) keterlibatan perempuan dalam Jamaah Produksi dan Paguyuban Tani, (3) Pelibatan perempuan dalam Dewan Pembangunan Desa (Tim 11). Temuan juga memperlihatkan kendala adanya penolakan dari masyarakat untuk poin ketiga. Hal ini dapat diatasi dengan kembali pada visi SPPQT, kesetaraan gender perlu dilihat sebagai solusi untuk meningkatkan sektor pertanian.

Kata kunci: peran perempuan, kelompok tani, marginalisasi

Anita Dhewy & Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Kebaruan Politik dan Hukum Sebagai Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Advokasi Kebijakan Afirmatif Pemilu dan UU PKDRT

Political and Legal Novelty as the Contribution of Indonesian Women's Movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election and Law on the Abolition of Domestic Violence

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 24 No. 1, Februari 2019, hal. 77-87, 10 daftar pustaka

This article discusses the novelty of the women's movement in encouraging women's political representation and advocating for the elimination of domestic violence. Data is obtained through interviews with actors involved in the women's movement, especially actors from civil society organizations. The results of the study show that the women's movement in the Advocacy on Affirmative Policy in Election becomes a sign of the inclusion of women in the political agenda. While the women's movement in the advocacy for Law on the Abolition of Domestic Violence dismantles private and public dichotomies that are detrimental to women in the context of domestic violence. This study also shows that women's movements need strong concepts, adaptive strategies and synergies with various elements to be able to push the women's agenda and encourage change.

Keywords: women's movement, women's political representation, affirmative action, Law on the Abolition of Domestic Violence

Artikel ini membahas kebaruan yang dihasilkan gerakan perempuan dalam mendorong keterwakilan politik perempuan dan advokasi penghapusan KDRT. Data diperoleh melalui wawancara terhadap para aktor yang terlibat dalam gerakan perempuan, khususnya para aktor dari organisasi masyarakat sipil. Hasil kajian memperlihatkan gerakan perempuan untuk advokasi kebijakan afirmatif pemilu menjadi penanda masuknya perumusan perempuan dalam agenda perpolitikan. Sementara gerakan perempuan untuk advokasi UU PKDRT membongkar dikotomi privat dan publik yang merugikan perempuan dalam konteks kekerasan di ranah domestik. Kajian ini juga menunjukkan gerakan perempuan membutuhkan konsep yang kuat, strategi yang adaptif dan sinergi dengan berbagai elemen untuk dapat mendesakkan agenda perempuan dan mendorong perubahan.

Kata kunci: gerakan perempuan, keterwakilan politik perempuan, tindakan afirmatif, UU PKDRT

Aksi Kolektif Perempuan untuk Pemberdayaan di Indonesia

Women's Collective Action for Empowerment in Indonesia

¹Anne Lockley, ¹Lies Marcoes, ¹Kharisma Nugroho & ²Abby Gina

¹Migunani dan ²Jurnal Perempuan
Karanglo RT 003 RW 032, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Indonesia, 55581
Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12540

kharisma_nugroho@yahoo.com.sg & abbygina@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 4 Februari 2019, direvisi 16 Februari 2019, diputuskan diterima 26 Februari 2019

Abstract

Women's collective action has been used by women's group in Indonesia since early 20th century. The collective action of women in this study is defined as the formal or informal formation and activity of groups or networks of predominantly women that aim to bring about positive changes in women's lives. Eight case studies of women's collective actions discussed in this study reveal variety of backgrounds, motives and agencies in those collective actions. This variety exist due to the different and specific conditions and needs of each of the women's groups. The object of the study in this research were eight collective actions, namely: Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA), Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Parepare branch, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center, and Posko Lestari and Posko Mentari. The data of the research were collected through document review, surveys, and in-depth interviews. This research finds that the involvement of women in collective actions stem from gender inequality that they experience in their daily lives. Through the collective actions the women were empowered to strengthen their access to social services and legal protection. This research also finds there were growing understanding about the concept of gender inequality among the women who involved in the collective actions.

Keywords: women's collective action, empowerment, gender inequality, participation

Abstrak

Aksi kolektif perempuan telah banyak dilakukan oleh berbagai kelompok di berbagai wilayah di Indonesia sejak awal abad ke-20. Aksi kolektif perempuan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pembentukan dan aktivitas formal maupun informal dari kelompok atau jejaring para perempuan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan perempuan. Delapan studi kasus aksi kolektif perempuan yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan keragaman latar belakang, motif dan agen dalam aksi-aksi kolektif. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi dan kebutuhan tiap kelompok perempuan. Objek kajian dalam penelitian ini adalah delapan aksi kolektif di Balai Sakinah 'Aisyiyah, Serikat PEKKA, Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Parepare, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center dan Posko Lestari dan Mentari. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen, survei dan wawancara mendalam. Riset ini menemukan bahwa ketidakadilan gender merupakan faktor yang mendorong keterlibatan para perempuan di dalam aksi kolektif. Melalui aksi kolektif para perempuan dapat memperkuat akses mereka terhadap layanan sosial dan perlindungan hukum. Melalui aksi kolektif juga ditemukan tumbuhnya pemahaman tentang ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan.

Kata kunci: aksi kolektif perempuan, pemberdayaan, ketimpangan gender, keterlibatan

Pendahuluan

Diskriminasi terhadap perempuan bersifat sistematis dan pelakunya bukan hanya individu tetapi juga komunitas dan negara. Oleh karena itu gerakan perlawan terhadap diskriminasi perempuan muncul sebagai *agency* kelompok bukan semata-mata tindakan individu. Agensi kelompok ini menolak subordinasi dan tekanan yang dimanifestasikan melalui aksi kolektif terhadap budaya, politik, dan individu (Abrams 1999, h. 807). Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan berupa kekerasan dalam rumah tangga,

pernikahan anak, stigma terhadap perempuan kepada keluarga, kemiskinan perempuan, minimnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat, dan lainnya adalah segelintir dari sekian banyak persoalan yang sehari-hari dihadapi perempuan. Salah satu upaya perempuan dalam merespons situasi diskriminatif terhadap mereka dilakukan melalui aksi kolektif. Tulisan ini membahas bentuk-bentuk aksi kolektif perempuan akar rumput di delapan studi kasus sebagai upaya pemberdayaan dalam menghadapi diskriminasi terhadap perempuan.

Aksi kolektif perempuan bukan hal yang baru di Indonesia, karena sejak abad ke-20 praktik ini sudah terjadi di berbagai daerah. Menurut Susan Blackburn, dalam konteks sejarah Indonesia, gerakan perempuan telah berjuang untuk mengartikulasikan keprihatinan tentang status mereka, pengalaman diskriminasi, dan penindasan dengan cara mengorganisasikan diri ke dalam organisasi perempuan dan terlibat dalam politik. Menurut Blackburn gerakan perempuan melalui organisasi lebih memiliki kekuatan dan berkelanjutan daripada upaya-upaya individual (Blackburn 2004, h. 11). Artinya, kekuatan kolektif telah dipandang sebagai metode yang penting dalam gerakan perempuan di Indonesia.

Aksi kolektif perempuan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pembentukan dan aktivitas formal maupun informal dari kelompok atau jejaring para perempuan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam kehidupan perempuan. Yang dimaksud dengan aksi kolektif adalah proses bekerja untuk memengaruhi perubahan, melalui pembentukan dan pemeliharaan organisasi secara sukarela dan sekaligus keputusan kelompok untuk bergerak secara kolektif (Pandolfelli, Meinzen-Dick & Dohrn 2007, hh. 1-3).

Pemberdayaan dalam penelitian ini dipahami sebagai perubahan positif yang terkait dengan lima jenis aset kerangka pemberdayaan MAMPU, yaitu: aset manusia (kekuatan di dalam), aset keuangan dan sumber daya (kendali), aset kapasitas (kekuatan untuk), aset sosial (kekuatan dengan), dan aset pendukung. Kerangka pemberdayaan MAMPU salah satunya dikembangkan dari Konsep Rowlands (1997) tentang kuasa (power).

Penelitian ini mengkaji delapan aksi kolektif sebagai studi kasus. Delapan aksi kolektif tersebut adalah Balai Sakinah 'Aisyiyah, Serikat PEKKA, Sekolah Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Parepare, MUIWO, Kelompok Bunda Kreatif, Community Center dan Posko Lestari dan Mentari. Dari sejarah pendiriannya kedelapan organisasi ini lahir pada zaman yang berbeda. Aksi kolektif pertama adalah 'Aisyiyah. Perkumpulan 'Aisyiyah berdiri pada 1917, yang dahulu bernama Sapa Tresna. 'Aisyiyah adalah aksi kolektif yang berbasis agama, yang berfokus mempromosikan pendidikan bagi perempuan dan anak perempuan sejak awal abad ke-20.

Di bawah pemerintahan Orde Baru Soeharto (1966-1998), gerakan masyarakat sipil ditekan. Pergerakan perempuan secara ekstensif ditertibkan dengan tujuan menjinakkan perempuan Indonesia (Blackburn 2004; Wieringa 2015). Pada masa itu aksi kolektif perempuan di tingkat masyarakat kemudian perlahaan menghilang, kecuali yang terkait dengan kelompok keagamaan dan

PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). PKK sendiri pada mulanya adalah sebuah aksi kolektif di tingkat lokal yang berdiri di Jawa Tengah, namun setelah dikontrol oleh negara, PKK kehilangan karakter aslinya sebagai sebuah aksi kolektif perempuan. Nama PKK pun kemudian diubah oleh Orde Baru menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Community Center dan Posko Lestari adalah contoh aksi kolektif perempuan yang lahir di akhir era Orde Baru. Posko Lestari berdiri pada tahun 1994 untuk isu lingkungan. Community Center berfokus pada isu-isu yang dihadapi perempuan di tingkat lokal, seperti kematian ibu, kekerasan terhadap perempuan, dan kehamilan tak diinginkan pada remaja. Sementara itu, Posko Lestari adalah aksi kolektif yang terbentuk karena basis kepedulian atas lingkungan.

Memasuki era Reformasi, ruang bagi partisipasi perempuan semakin luas, tidak terbatas pada kelompok PKK dan kegiatan organisasi keagamaan. Hal ini berbeda dengan masa Orde Baru dimana aksi-aksi kolektif perempuan yang bersifat feminis dan kritis sangat dikontrol. Pada masa Reformasi aksi kolektif perempuan muncul dari konteks dan faktor yang beragam. Sistem budaya, agama dan kepercayaan, kekerabatan, pemerintahan, serta kemiskinan adalah beberapa faktor yang menjadi pendorong perempuan untuk berkumpul, baik untuk berinteraksi sosial maupun mendapatkan dukungan sosial. Aksi kolektif perempuan pada masa sekarang juga didorong oleh faktor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, merespons ketidakadilan gender dan ancaman bagi keamanan para perempuan. Serikat PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), KPI Cabang Parepare, Sekolah Perempuan, MUIWO (Migrant Workers United Wonosobo) dan PPR (Perempuan Pekerja Rumahan) Kelompok Bunda Kreatif Yasanti dan Posko Mentari adalah contoh dari aksi-aksi kolektif yang muncul di era Reformasi.

Kedelapan aksi kolektif yang dibahas dalam tulisan ini, merupakan organisasi atau kelompok yang menjadi mitra Program MAMPU (Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dalam menelaah delapan studi kasus aksi kolektif. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana dan dalam kondisi seperti apa keterlibatan perempuan dalam kelompok-kelompok lokal menghasilkan pemberdayaan individu dan kolektif? Sementara pertanyaan turunan difokuskan untuk mengetahui pengalaman konkret perempuan

terkait keanggotaan mereka pada aksi kolektif tertentu. Pertanyaan tersebut mencakup fokus aksi kolektif dan dampak aksi kolektif pada pemberdayaan perempuan

separa individu maupun kolektif. Pertanyaan tersebut menjadi dasar penelitian atas delapan studi kasus berikut:

Tabel 1. Lokasi Penelitian Lapangan

Contoh aksi kolektif perempuan	Lokasi penelitian lapangan	Terkait dengan (mitra nasional MAMPU)
Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA)	Kabupaten Pangkajene Kepulauan (PanKep), Sulawesi Selatan (pedesaan)	'Aisyiyah
Posko	Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (pedesaan)	Komnas Perempuan Forum Pengadaan Layanan - Dewan Pengarah Nasional, dengan sub-mitra Swara Parangpuan
Sekolah Perempuan	Kabupaten Gresik, Jawa Timur (pedesaan)	Kapal Perempuan dengan sub-mitra Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K)
<i>Balai Perempuan</i>	Kabupaten Parepare, Sulawesi Selatan (perkotaan)	Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
Migrant Workers United Wonosobo (MUIWO)	Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah (pedesaan)	Migrant CARE dengan sub-mitra Social Analysis Research Institute (SARI)
Serikat PEKKA	Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (pedesaan)	PEKKA
Community Center	Kabupaten Merangin, Jambi (pedesaan)	Permampu, melalui Forum Komunikasi Perempuan and Aliansi Perempuan Merangin, (APM)
Kelompok Kreatif Bunda	Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta (peri-urban)	Yasanti, melalui Program Perempuan Pekerja Rumahan (PPR)

Sumber: Diolah dari data lapangan

Penelitian ini berfokus pada tingkat desa atau masyarakat sebagai lokus kegiatan serta lokus perubahan yang diharapkan. Data diperoleh melalui wawancara perorangan dan kelompok, serta survei yang dilakukan kepada para anggota aksi kolektif. Secara keseluruhan sejumlah 219 perempuan dan 78 laki-laki berpartisipasi dalam wawancara individu atau kelompok, dan sebanyak 169 anggota dari berbagai aksi kolektif perempuan menjadi sasaran survei.

Karakteristik Aksi Kolektif Perempuan

Fokus aksi kolektif secara keseluruhan adalah pengembangan rasa percaya diri, keyakinan diri, pengetahuan dan keterampilan perempuan. Aksi kolektif juga menarget interaksi yang lebih besar antara perempuan dan pengambil keputusan lokal dan penyedia layanan. Berdasarkan tabel diketahui pula bahwa aksi kolektif perempuan berfokus untuk mendorong akses kepada layanan dan meningkatkan pendapatan bagi anggota, serta seiring waktu kepada masyarakat secara luas.

Kedelapan aksi kolektif tersebut mendorong pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan dengan

mengacu pada konsep hak. Misalnya hak perempuan di bidang politik, hak perempuan atas kesehatan reproduksi dan seksual, dan hak ekonomi. Aksi kolektif tersebut juga mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan. Hal ini dilakukan dengan mengadvokasi isu-isu lokal yang dihadapi oleh perempuan kepada pemerintah mulai dari tingkat desa hingga kabupaten/kota.

Delapan aksi kolektif yang diteliti merepresentasikan tiga jenis hubungan antara mitra nasional Program MAMPU dengan aksi kolektif di tingkat lokal. Fokus pemberdayaan tiap aksi kolektif berbeda antara satu dengan lainnya. Namun demikian, dapat diketahui bahwa aksi kolektif yang diteliti berfokus pada lima area tematik yaitu: (1) Meningkatkan akses perempuan kepada program-program perlindungan sosial pemerintah. (2) Meningkatkan akses perempuan kepada peluang kerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja. (3) Meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri. (4) Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu (maternal) dan reproduksi. (5) Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Kedelapan aksi kolektif yang diteliti bertujuan meningkatkan akses perempuan kepada layanan. Strategi utama yang digunakan adalah pendampingan langsung kepada perempuan tersebut seperti dalam kasus identitas hukum, akses kepada layanan, serta

advokasi tingkat lokal yang berusaha menciptakan peraturan dan alokasi sumber daya yang mendukung. Kelima area tematik tersebut diadvokasi oleh tiap jenis aksi kolektif secara sama ataupun berbeda, tergantung pada fokus area, seperti dipaparkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tujuan dan fokus mitra nasional MAMPU terkait dengan aksi kolektif perempuan

Contoh	Fokus mitra MAMPU	Fokus aksi kolektif perempuan terkait
Tipe A: Struktur vertikal multitingkatan		
Balai Sakinah 'Aisyiyah/Aisyiyah	Meningkatkan nilai dan harkat perempuan sesuai dengan ajaran Islam; meningkatkan peluang pendidikan dan ekonomi bagi perempuan; meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sosial, kesejahteraan masyarakat, kesehatan, hukum dan peradilan, serta lingkungan. (Menarget area tematik 4)	Mengikuti kebijakan nasional 'Aisyiyah, dan lima isu prioritas yang disebutkan di sebelah kiri.
Koalisi Perempuan Indonesia/Balai Perempuan	Pemenuhan hak perempuan dibidang politik, ekonomi, hukum, seksual, reproduksi, pendidikan, agama, sosial dan budaya serta lingkungan. Memperkuat kepemimpinan perempuan, meningkatkan akses kepada skema perlindungan sosial, dan penyediaan layanan dasar untuk mengurangi kemiskinan. (Menarget area tematik 1)	Pembangunan kapasitas anggota berfokus pada pembangunan pengetahuan tentang hak asasi perempuan, meningkatkan percaya diri, kolegialitas, dan jaringan. Keterwakilan dan kepemimpinan; dukungan untuk akses kepada layanan, termasuk dalam kasus kekerasan terhadap perempuan; dan akses kepada perlindungan sosial.
PEKKA/Serikat PEKKA	Meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan perempuan kepala keluarga; membuka berbagai pilihan pencaharian; membangun kesadaran kritis menuju kesetaraan peran, posisi dan status, dan partisipasi perempuan di kehidupan sosial dan politik; mempromosikan peran perempuan kepala rumah tangga, dari tingkat rumah tangga hingga negara. (Menarget area tematik 1)	Memulai dengan simpan pinjam dan melangkah lebih lanjut dengan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai area keorganisasian dan teknis. Membangun keterampilan advokasi dan representasi, serta meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Fokus spesifik pada dukungan untuk meningkatkan skema dokumen identitas hukum dan perlindungan sosial.
Tipe B: Pelibatan submitra		
Insititut KAPAL Perempuan / KPS2K/Sekolah Perempuan	Empat kegiatan saling terkait: (i) pengembangan pengetahuan; (ii) penguatan kepemimpinan perempuan; (iii) advokasi berbasis data; dan (iv) pengembangan kelembagaan. (Menarget area tematik 1)	Kelompok belajar tingkat desa yang berfokus pada pendidikan kritis dan kesadaran gender di wilayah miskin. Melalui KPS2K, advokasi untuk meningkatkan ketersediaan dan akses kepada layanan.
Migrant CARE/ SARI/MUIWO	Memperkuat perlindungan negara atas hak pekerja migran; meningkatkan kapasitas dan jaringan organisasi; dan mengadvokasi layanan terkait pekerja migran. (Menarget area tematik 3)	Pelatihan dan pengembangan keterampilan terkait kegiatan yang berpotensi menciptakan pendapatan. Melalui SARI, mendorong pengembangan peraturan dan layanan lokal untuk mendukung migrasi aman dan integrasi pekerja migran yang telah pulang.

Contoh	Fokus mitra MAMPU	Fokus aksi kolektif perempuan terkait
Yayasan Annisa Swasti (Yasanti)/ Perempuan Pekerja Rumahan/ Kelompok Bunda Kreatif	Berfokus untuk: (i) memperkuat organisasi perempuan menjadi independen dan demokratis; (ii) mengembangkan kesadaran kritis bagi pekerja perempuan dengan pengorganisasian, pendidikan dan advokasi; dan (iii) memperkuat hak ekonomi perempuan. (Menarget area tematik 2)	Memfasilitasi pengorganisasian perempuan pekerja rumahan dengan tujuan membangun pemahaman tentang hak mereka sebagai pekerja, memperluas akses kepada layanan, meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui perusahaan berbasis rumahan, dan melalui inisiatif Perempuan Pekerja Rumahan yang mempromosikan perlindungan pekerja rumahan melalui advokasi kebijakan dan informasi.
Tipe C: Kegiatan multi pemangku kepentingan		
KOMNAS Perempuan- FPL DPN/Swara Parangpuan/ Posko	Memonitor dan memengaruhi kebijakan dan layanan terkait kekerasan terhadap perempuan; pembangunan kapasitas terkait undang-undang dan peraturan terkait kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Dukungan langsung kepada akses terhadap layanan; meningkatkan mekanisme pencegahan kekerasan berbasis masyarakat (anggota FPL- DPN). (Menarget area tematik 5)	Pengorganisasian masyarakat untuk membantu perempuan dan anak-anak yang terdampak kekerasan; advokasi untuk formalisasi dukungan masyarakat; rujukan ketingkat yang lebih tinggi dengan dukungan dari Swara Parangpuan; informasi dan pendidikan bagi anggota masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi penerimaan atas kekerasan dan mencegah kekerasan.
Permampu/ APM/ Community Center	Mengadvokasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) perempuan; mengembangkan kepemimpinan dan bekerja untuk memberdayakan perempuan akar rumput khususnya di Sumatra. Memberikan pendidikan dan monitoring yang komprehensif tentang HKSR, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama; Mengadvokasi kebijakan dan alokasi sumber daya lokal yang mendukung; melaksanakan penelitian dan dokumentasi; mengembangkan jaringan hak seksual dan kesehatan reproduksi. (Menarget area tematik 4)	Menyediakan pelatihan bagi perempuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi dengan kerangka feminis. Melalui APM, mengadvokasi perubahan kebijakan lokal dan alokasi sumber daya.

Sumber: Fasilitator survei, wawancara dengan mitra nasional, submitra, fasilitator, dan anggota aksi kolektif, serta informasi dari website MAMPU dan mitra nasional.

Studi atas delapan aksi kolektif perempuan menemukan setidaknya tiga jenis hubungan antara mitra nasional Mampu dengan aksi kolektif di tingkat lokal yaitu: tipe A (struktur vertikal multitingkatan); tipe B (pelibatan submitra); dan tipe C (kegiatan multipemangku kepentingan).

Aksi kolektif tipe A (struktur vertikal multitingkatan) memiliki karakteristik sebagai berikut: mitra nasional berhubungan dengan kelompok lokal melalui perwakilan provinsi, kabupaten atau kecamatan. Identitas kelompok lokal mencerminkan identitas mitra nasional dan memiliki bentuk yang serupa di setiap lokasi. Anggota aksi kolektif tipe A bersifat spesifik seperti misalnya anggota Balai Sakinah 'Aisyiyah (BSA) dan perempuan kepala rumah tangga (Serikat PEKKA). Organisasi-organisasi mitra nasional tersebut memiliki strategi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perempuan di kelompok lokal.

Aksi kolektif tipe B (pelibatan submitra) memiliki karakteristik sebagai berikut: mitra nasional membentuk kemitraan dengan masyarakat sipil di berbagai tingkatan yang bekerja di isu yang sama. Para submitra ini kemudian membentuk atau mendukung kelompok-kelompok aksi kolektif atau kegiatan yang terkait dengan isu bersama. Identitas kelompok lebih bersifat individu, sementara peran submitra lebih dominan. Pada aksi kolektif tipe B, terdapat perhatian khusus untuk mengintegrasikan kesadaran akan hak dan advokasi ke dalam pembentukan kelompok dan pendidikan bagi anggota.

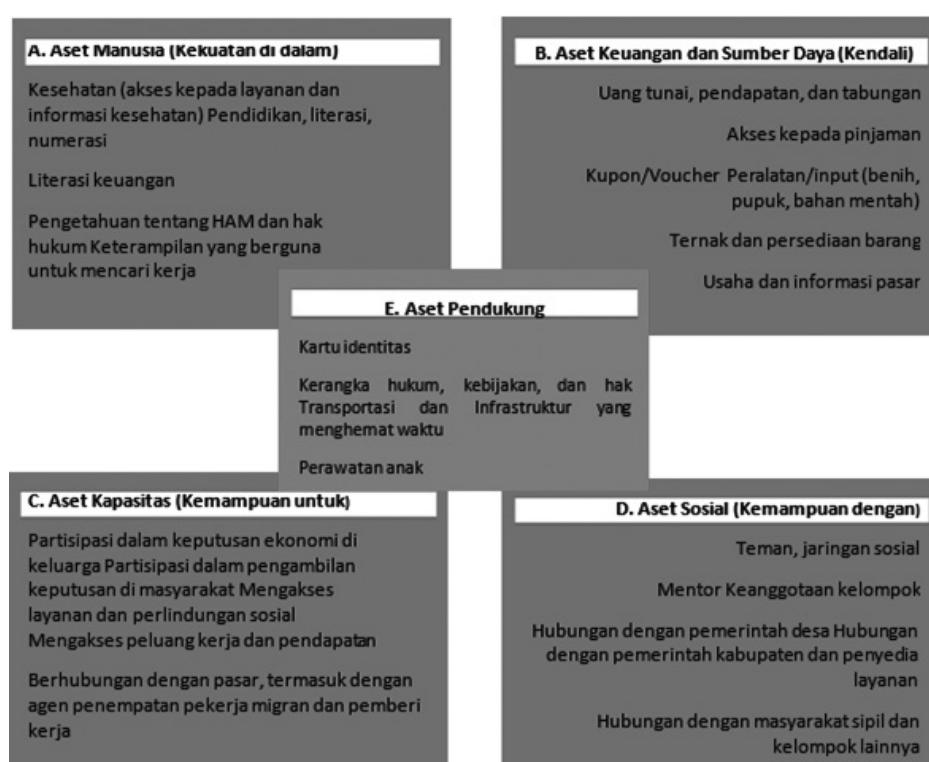
Aksi kolektif tipe C (kegiatan multipemangku kepentingan) pada hakikatnya adalah interaksi multipemangku kepentingan. Artinya organisasi masyarakat sipil (OMS) yang terlibat di dalam upaya ini dapat memiliki hubungan langsung ke tingkat desa maupun tidak. Tampak bahwa mereka yang berada dalam struktur vertikal multitingkatan, berada pada posisi

yang memungkinkan untuk mendorong pembentukan kelompok yang berpotensi lebih untuk berkelanjutan. Contoh aksi kolektif tipe C adalah (1) Permampu, melalui Forum Komunikasi Perempuan Akar Rumput di tingkat provinsi sampai dengan kelompok perempuan di tingkat desa. Dalam kasus ini diwakili oleh Community Center yang merupakan komunitas dampingan APM (Aliansi Perempuan Merangin); (2) KOMNAS Perempuan melalui FPL-DPN (Forum Pengada Layanan-Dewan Pengarah Nasional). Di beberapa wilayah, anggota FPL-DPN memiliki akses langsung kepada aksi kolektif perempuan di tingkat desa, seperti misalnya Swara Parangpuan melalui kegiatan posko. Pelibatan submitra dan kegiatan multipemangku kepentingan memungkinkan terjadinya

keberagaman karena berbagai organisasi dilibatkan di dalamnya. Ketiga jenis hubungan mitra nasional dengan aksi kolektif lokal menerapkan strategi-strategi yang bernilai setara, meskipun arah perluasannya berbeda.

Pemberdayaan Perempuan melalui Aksi Kolektif

Berdasarkan survei dan wawancara ditemukan fakta bahwa aksi kolektif yang dilakukan perempuan telah memengaruhi kebijakan meskipun sifatnya masih terlokalisasi. Aksi kolektif di delapan daerah ini berfokus pada tingkat desa atau maksimal pada kebijakan daerah (tingkat kabupaten/kota).



Gambar 1. Kerangka Pemberdayaan
Sumber Bagan: Diolah dari konsep Power dari Rowland 1997

Kerangka pemberdayaan MAMPU didasarkan pada karya Rowlands yang mengconceptualisasikan berbagai bentuk komponen kekuasaan: (1) Kekuatan atas (*power over*): kemampuan untuk memengaruhi dan memaksa; (2) Kekuatan untuk (*power to*): mengorganisasi dan mengubah hierarki yang ada; (3) Kekuatan dengan (*power with*): peningkatan kekuatan dari aksi kolektif dan solidaritas; (4) Kekuatan dari dalam (*power from within*): peningkatan kesadaran individu dan keinginan untuk berubah (Rowlands 1997).

Secara umum, para anggota aksi kolektif merasakan banyak dampak positif dari partisipasi mereka dalam aksi kolektif. Melalui survei, diketahui dampak pemberdayaan yang dirasakan oleh anggota aksi kolektif.

Memberdayakan Perempuan Melalui Penguatan Aset Manusia

Aset manusia atau aset individu mencakup perubahan kesehatan dan pendidikan pribadi, keterampilan dan pengetahuan, termasuk literasi, numerasi, pendapatan

dan keterampilan untuk bekerja, serta rasa keyakinan diri dan percaya diri di tingkat individu. Para anggota ditanya apakah mereka merasa mendapatkan manfaat pada diri mereka, seperti peningkatan rasa percaya diri, keterampilan, atau status kesehatan (dalam satu

pertanyaan). Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah, hampir seluruh anggota aksi kolektif di semua contoh yang diteliti melaporkan adanya perubahan dalam ranah pemberdayaan ini.

Tabel 3. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang disurvei yang melaporkan perubahan positif terkait aset manusia

Balai Sakinah 'Aisyiyah	Posko	Sekolah Perempuan	Balai Perempuan	MUIWO	Serikat PEKKA	Community Center	Kelompok Bunda Kreatif	Seluruh contoh:
96%	84%	100%	95%	80%	100%	95%	100%	94%

Sumber: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Ya/tidak menjawab

Percaya diri yang didapatkan merupakan langkah awal yang penting bagi perempuan, khususnya yang berasal dari elemen masyarakat yang sangat marginal. Program-program pembangunan kapasitas terstruktur yang dijalankan oleh beberapa mitra tampak berhasil mempercepat dan menjaga berjalanannya perkembangan ini.

Salah satu capaian sukses pemberdayaan aksi kolektif pada aspek individu dapat ditemukan pada Serikat PEKKA. Serikat PEKKA didirikan pada tahun 2000, didasari ide awal dari KOMNAS Perempuan untuk mendokumentasikan kehidupan para janda di kawasan konflik Aceh, dan niat Program Pembangunan Kecamatan untuk membantu mereka dalam mengakses sumber daya untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan trauma yang mereka hadapi. Organisasi PEKKA hingga kini telah menjangkau 20 provinsi dan lebih dari 55.000 perempuan kepala keluarga mendapat manfaat (Pratiwi 2018, h. 143). Anggota Serikat PEKKA adalah para perempuan kepala keluarga. Mereka menjadi kepala keluarga karena suami meninggal, bercerai atau berpisah, atau karena ditinggalkan suami. Anggota PEKKA kebanyakan berasal dari kelompok miskin dan rentan di masyarakat. Stigma buruk tentang janda menjadikan mereka kelompok sub marginal dalam masyarakat. Artinya kategori sosial di masyarakat menjadi salah satu persoalan yang membuat perempuan harus mengalami kemiskinan berlapis. Perempuan kepala keluarga tak jarang mengalami domestikasi dan dieksklusi dari kerja-kerja produktif karena stigma buruk yang melekat pada status mereka.

Sebagai aksi kolektif perempuan, PEKKA berupaya menghapus stereotip tentang janda, mendorong pengembangan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Di banyak daerah di Indonesia, budaya setempat mengatur bahwa janda tidak boleh memiliki

kehidupan sosial atau muncul di hadapan umum. Kata "janda" sendiri telah mengandung stigma yang merugikan perempuan. Seperti penuturan kader Serikat PEKKA Sukerede, Lombok Barat, NTB dalam wawancara kelompok pada Oktober 2016 berikut, "Masyarakat berpikir kalau seorang janda keluar rumah, dia akan menggoda suami orang. Kami dilecehkan, direndahkan dan dimarginalkan. Ketika kami bicara, kami tidak pernah didengar atau dihargai."

Kerja yang dilakukan PEKKA adalah perlawan atas stigma negatif terhadap perempuan janda. Melalui Serikat PEKKA, para anggota mendapatkan penguatan pada aspek individu atau manusia.

(Kami) dilatih secara pikiran tentang cara berbicara di depan umum, bagaimana kami bisa berjuang sendiri, dan bagaimana cara membantu masyarakat ... Kami mendapatkan pelatihan, kami mengetahui manfaatnya, lalu kami berbagi baik di dalam kelompok maupun di luar kelompok, kepada tetangga-tetangga ... mereka melihat buktinya. Sejak itu, banyak orang meminta saran dari kami, bukan hanya anggota saja. (Kader Serikat PEKKA Sukerede Lingsar, wawancara kelompok Oktober 2016)

Perubahan yang paling terlihat dari keseluruhan wawancara adalah peningkatan rasa percaya diri. Anggota Serikat PEKKA menjadi lebih berani untuk menyatakan pendapatnya, berpartisipasi di dalam kehidupan publik secara lebih aktif. Kutipan di atas juga menunjukkan bahwa aksi kolektif telah membawa perubahan tentang bagaimana janda dimaknai oleh masyarakat setempat. Dengan memberdayakan manusia dan menunjukkan partisipasi yang berarti pada masyarakat sekitar, PEKKA telah membuat perempuan kepala keluarga menjadi lebih berdaya, diterima dan diakui di masyarakat. Dengan berpartisipasi di Serikat PEKKA, banyak perempuan kepala rumah tangga dapat bersatu dan membangun kekuatan kolektif, yang dimulai

dengan adanya kesempatan untuk berinteraksi sosial dan mendapatkan dukungan sejawat (*peer support*).

Pengembangan aset individu lainnya dicapai pula oleh Sekolah Perempuan, yang digagas baik oleh Yasanti bersama Kelompok Kreatif Bunda maupun Institut KAPAL Perempuan dengan submitra KPS2K (Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan). Aksi kolektif cukup berhasil membangun kesadaran kritis perempuan tentang gender. Para anggota telah terpapar mengenai isu-isu perempuan. Dari salah satu hasil wawancara, tampak telah tumbuh kesadaran tentang keberpihakan kepada korban (perempuan).

Contoh lain adalah kasus pemerkosaan. Sebenarnya, siapa yang salah dalam hal itu? Biasanya kita menyalahkan perempuan karena mengenakan rok mini, misalnya ... Menurut saya, jika Anda mau memakai jilbab atau lainnya [itu hak Anda], tapi pihak laki-lakinya dalam hal ini yang melampaui batas ... Sekarang kami tidak bisa pura-pura tidak tahu lagi tentang isu-isu perempuan di desa kami. Sekarang kami sudah melihatnya dari kacamata yang berbeda. Jadi, saya merasa ini yang disebut sebagai 'bersikap kritis'. (Koordinator Desa Sekolah Perempuan Kesamben Kulon Gresik, wawancara mendalam Agustus 2016).

BSA (Balai Sakinah 'Aisyiyah) sebagai aksi kolektif di level desa yang telah hadir sejak periode perjuangan kemerdekaan juga telah memberdayakan para anggotanya secara signifikan. BSA berfokus pada penguatan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual perempuan, isu-isu yang digeluti adalah seputar keluarga berencana, ASI eksklusif, akses kepada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), akses kepada perlindungan sosial, dan kesehatan reproduksi perempuan dengan fokus khusus pada deteksi dini atau pencegahan kanker. Anggota BSA adalah perempuan berusia reproduksi, miskin, dan mengalami keterbatasan akses kepada informasi dan pengetahuan. BSA dapat memanfaatkan pintu masuk dari sisi kesehatan reproduksi dan kemudian memasukkan pembahasan hak, berbagai jenis pengetahuan, serta memberdayakan anggotanya melalui penguatan pengambilan keputusan. BSA membangun pengetahuan dan mendekatkan akses perempuan kepada layanan kesehatan reproduksi, khususnya yang terkait dengan penyakit kanker yang rentan diderita perempuan. Minimnya pengetahuan

perempuan tentang kesehatan reproduksi banyak terkendala oleh tabu masyarakat terkait seksualitas dan BSA telah berhasil mematahkan.

Meskipun wilayah ini dekat dengan pusat kota, namun dalam beberapa kasus ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih kurang mendapatkan informasi, khususnya tentang kesehatan reproduksi, karena mereka masih malu bahkan untuk sekadar bertanya tentang kesehatan reproduksi. (Tim Koordinasi 'Aisyiyah/MAMPU Pangkep, wawancara mendalam September 2016)

Pada wawancara kelompok anggota BSA di Bireang, Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, diperkirakan sekitar 70 persen anggota telah dapat mengakses layanan-layanan ini. 'Aisyiyah dan BSA telah berhasil mengadvokasi peningkatan layanan di puskesmas di Biraeng, serta mendorong tenaga kesehatan untuk menjangkau dan memberikan informasi kepada perempuan.

Aksi kolektif BSA telah menghasilkan pemberdayaan bidang kesehatan reproduksi pada perempuan. Hal ini membuat BSA mendapat apresiasi dari pimpinan desa. Kerja kolektif ini dengan demikian telah membuka partisipasi yang lebih luas terkait advokasi kesehatan reproduksi perempuan. Isu ini menjadi perhatian bersama dalam skala yang lebih besar. 'Aisyiyah ditambah dengan bantuan sektoral membantu dalam menghubungkan para anggota BSA kepada layanan kesehatan dan pemerintah.

Pemberdayaan Melalui Penguatan Ekonomi

Aset keuangan dan sumber daya mencakup pendapatan dan tabungan, kemampuan untuk meminjam, mengakses pasar, meningkatkan masukan produktif, termasuk peralatan dan perlengkapan. Tabel 4 menunjukkan sejauh apa tiap anggota merasa mendapat manfaat keuangan. Dari seluruh aksi kolektif memang tidak banyak yang berfokus atau berinvestasi pada pengembangan aspek ini. Tabel menunjukkan relatif sedikit anggota yang merasakan perubahan pada aspek ini. Para anggota ditanya apakah mereka merasa telah menerima manfaat keuangan seperti peningkatan pendapatan, kemampuan untuk menabung dan meminjam, peningkatan akses kepada pasar, atau pendampingan terkait masukan dan aset produktif.

Tabel 4. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang disurvei yang melaporkan perubahan positif terkait aset ekonomi

Balai Sakinah 'Aisyiyah	Posko	Sekolah Perempuan	Balai Perempuan	MUIWO	Serikat PEKKA	Community Center	Kelompok Bunda Kreatif	Seluruh contoh:
12%	5%	5%	27%	25%	100%	0%	50%	28%

Sumber: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Ya/tidak menjawab

Terdapat bukti dalam pemberdayaan kolektif bahwa para anggota dapat terbantu dengan dana bersama, yaitu melalui kegiatan simpan pinjam. Tetapi masih belum jelas apakah hal itu mencerminkan adanya perubahan pendapatan yang berkelanjutan.

Pada delapan studi kasus yang diamati, Serikat PEKKA memiliki perhatian pada pembangunan aset keuangan dan sumber daya sebagai strategi inti mereka. PEKKA menyadari bahwa prioritas utama para calon anggota kelompok sering kali adalah status ekonomi mereka, sehingga PEKKA memulai dengan menjalankan kegiatan simpan pinjam sebagai pintu masuk. Kegiatan simpan pinjam memotivasi dan menarik banyak anggota kelompok, baik melalui dimensi produktif maupun protektif. Setiap anggota datang untuk menabung uang mereka, dan kelompok tersebut memutar tabungan tersebut sebagai pinjaman bagi para anggotanya untuk mengembangkan kegiatan produktif. Aksi kolektif yang dilakukan oleh Serikat PEKKA telah membawa perubahan dalam hal inklusi keuangan, khususnya akses kredit:

Kami dulu takut meminjam uang, dan tidak ada juga yang percaya pada kami, khususnya karena kami janda. "Siapa yang nanti akan membayar utangnya?" Tapi sebagai kelompok, kami bisa meminjam... Awalnya kami meminjam 100.000 rupiah, lalu 200.000. Kemudian setelahnya kami bergabung dengan koperasi, lalu kami bisa meminjam 500.000. Seiring waktu, kami bisa meminjam lima sampai enam juta rupiah. Kami menggunakan uangnya untuk beternak ikan, membeli bibit, dan pakan. (Kader Serikat PEKKA Sukerede, Lombok Barat, NTB, wawancara kelompok Oktober 2016)

Kutipan wawancara ini menunjukkan bahwa aksi kolektif Serikat PEKKA telah memberdayakan perempuan bukan hanya pada tingkat individu tetapi juga kolektif. Kekuatan dan identitas kelompok dalam aksi kolektif ini terbukti telah memberikan akses ekonomi yang lebih baik pada para perempuan kepala keluarga.

Pada Serikat PEKKA, pemberdayaan dimulai dengan interaksi sosial dan dukungan sejauh, lalu dilanjutkan dengan membantu perempuan memenuhi kebutuhan ekonomi dasar mereka, seperti melalui simpan pinjam dan akses kepada kredit yang lebih besar. Seluruh pintu masuk ini dibangun melalui informasi, pelatihan, dan paparan kepada masyarakat luas melalui pertemuan besar di

PEKKA maupun pertukaran lainnya. Hal ini membuat para anggota kemudian bekerja pada isu-isu yang menjangkau masyarakat secara luas (seperti akses kepada dokumen identitas hukum). Dari hal tersebut, anggota Serikat PEKKA mendapatkan status dan legitimasi.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa selain PEKKA, aksi kolektif lainnya seperti MUIWO, Sekolah Perempuan, dan Balai Sakinah 'Aisyiyah juga memberikan perhatian pada penguatan aset kendali dengan mengembangkan keterampilan terkait pendapatan dan upaya-upaya menciptakan peluang kerja. Namun pengembangan yang dirasakan tidak signifikan seperti halnya para anggota PEKKA.

Pemberdayaan keuangan kolektif juga dilakukan oleh Kelompok Kreatif Bunda dengan menerapkan inisiatif simpan pinjam, Balai Perempuan yang menerapkan sistem iuran anggota dengan tabungan bersama yang bisa digunakan untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu para anggota MUIWO juga menggunakan uang saku dan tunjangan transportasi mereka untuk menghadiri pertemuan atau pelatihan di luar desa untuk membentuk inisiatif simpan pinjam, yang ingin mereka lanjutkan jika berjalan lancar.

Penguatan Keterlibatan dan Pengaruh Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat

Aset kapasitas (*agency*) mencakup partisipasi dan pengaruh perempuan dalam keluarga dan masyarakat, serta akses yang lebih baik bagi perempuan pada pekerjaan, layanan, serta program-program pemerintah. Meskipun perubahan yang dilaporkan dalam aset kapasitas ini beragam diseluruh contoh aksi kolektif yang diteliti, terdapat beberapa contoh perubahan (Tabel 5). Pada survei anggota, para anggota ditanya apakah partisipasi atau pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan di keluarga atau masyarakat meningkat, apakah mereka dapat mengakses lapangan kerja yang lebih baik, atau mengakses layanan pemerintah sebagai hasil dari partisipasi mereka dalam aksi kolektif. Data kualitatif menunjukkan bahwa area dimana terjadi perubahan terbesar adalah yang terkait dengan partisipasi pada diskusi masyarakat dan forum pengambilan keputusan, khususnya di tingkat Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Tabel 5. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang disurvei yang melaporkan perubahan positif terkait aset kapasitas

Balai Sakinah 'Aisyiyah	Posko	Sekolah Perempuan	Balai Perempuan	MUIWO	Serikat PEKKA	Community Center	Kelompok Bunda Kreatif	Seluruh Contoh:
28%	74%	25%	82%	5%	62%	45%	30%	44%

Sumber: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Ya/tidak menjawab

Para anggota aksi kolektif juga telah menceritakan tentang akses kepada perlindungan sosial (Balai Perempuan, Serikat PEKKA), kesetaraan gender (Sekolah Perempuan), perlindungan pekerja rumahan (MUIWO) dan pengakuan pekerja rumahan (Kelompok Kreatif Bunda), akses kepada layanan kesehatan seksual dan reproduksi (Community Center, Balai Sakinah 'Aisyiyah), perlindungan perempuan dan anak-anak yang terdampak kekerasan (Posko, Balai Perempuan, Community Center), dan akses kepada identitas hukum (Serikat PEKKA, Sekolah Perempuan, MUIWO, dan Balai Perempuan).

Terdapat berbagai bukti adanya pemberdayaan kapasitas (*agency*) yang telah dicapai oleh delapan aksi kolektif perempuan di atas. Pemberdayaan kapasitas secara kolektif misalnya ditunjukkan melalui keterlibatan dan akuntabilitas Sekolah Perempuan pada pembangunan desa. Sekolah Perempuan setidaknya terlibat aktif dalam penyusunan proposal dana desa untuk membangun fasilitas air bersih, pendistribusian kartu kesehatan dan pendidikan untuk bantuan sosial, melakukan pengawalan dan kritik terhadap bantuan sosial yang kerap kali diskriminatif.

Salah satu perwakilan KPS2K, perantara CSO yang membantu kegiatan Sekolah Perempuan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menyatakan bahwa program-program bantuan sosial dulu cenderung mendiskriminasi, dan bukan memprioritaskan orang miskin, tapi sekarang [para staf desa] mengetahui bahwa para perempuan di Sekolah Perempuan dapat langsung [menyampaikan keluhan] ke kabupaten, dan sejak itu perilaku mereka berubah. Mereka sekarang mau lebih teliti dalam melihat [daftar calon penerima bantuan sosial] dan memberikan layanan kepada perempuan miskin. (Koordinator Sekolah Perempuan Desa Mondoluku dan perwakilan manajemen KPS2K Gresik, Wawancara mendalam Agustus 2016)

Bukan hanya pemberdayaan secara kolektif, tetapi peningkatan aset kapasitas juga dirasakan secara individual. Hal ini dibuktikan dengan menguatnya kapasitas para anggota untuk mengadvokasi kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain.

Saya juga sudah mendampingi teman saya ke rumah sakit atas nama Sekolah Perempuan. Saya merasa dihargai dan diakui oleh orang-orang di rumah sakit. Saya dapat mengungkapkan atau menyampaikan keluhan saya. Ketika saya diundang ke Musrenbang, atau diundang untuk berkomunikasi dengan kepala desa, saya sudah lebih berani untuk berbicara. (Koordinator Desa Sekolah Perempuan – Mondoluku Gresik, wawancara mendalam Agustus 2016)

Penguatan aset kapasitas artinya meningkatnya pengakuan bagi individu maupun kelompok aksi kolektif perempuan. Aksi kolektif perempuan memantapkan posisinya di masyarakat melalui pendekatan pragmatis, artinya modal sosial dikumpulkan melalui keterlibatan dan kontribusi berarti para perempuan terhadap masyarakat. Pengakuan didapatkan melalui kebermanfaatan dan prestasi mereka di dalam kelompok masyarakat. Pengakuan sebagai modal sosial pada akhirnya menjadi sarana atau pintu masuk ke dalam isu-isu yang dipandang lebih sensitif bagi masyarakat seperti isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Meskipun sejumlah capaian dan respons positif masyarakat tampak pada sejumlah paparan di atas, bukan berarti kerja aksi kolektif perempuan dapat bekerja dengan lebih mudah. Ini dikarenakan penerimaan atas aksi kolektif perempuan tidak seluruhnya dibangun oleh kesadaran akan kesetaraan hak atau telah diadopsinya gagasan feminis tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam kehidupan publik.

Tantangan yang harus dihadapi perempuan untuk melanjutkan perjuangan dalam aksi kolektif masih pelik, salah satunya adalah melakukan negosiasi dengan anggota keluarga, misalnya suami yang tak sungguh-sungguh mendukung keterlibatan perempuan dalam aksi kolektif. Dalam kasus tertentu, perempuan diizinkan oleh suaminya untuk bergabung dalam aksi kolektif hanya demi motif ekonomi. Dalam kasus lainnya, perempuan dapat bergabung dengan aksi kolektif, namun dengan syarat dan ketentuan bahwa tugas utama perempuan di wilayah domestik harus menjadi yang utama. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aksi kolektif masih menuai sejumlah resistensi. Hal ini adalah manifestasi dari budaya patriarkat, yang kerap mereduksi ruang gerak perempuan sebatas pada ranah domestik.

Pemberdayaan Perempuan Melalui Aset Sosial

Aset sosial mencakup teman, saudara, dan jaringan sosial, inspirasi dari orang lain maupun membantu orang lain, serta akses kepada orang-orang berpengaruh. Keinginan meningkatkan interaksi sosial selalu menjadi pendorong utama bagi perempuan untuk bergabung dan berpartisipasi di dalam aksi kolektif. Dalam survei, para anggota ditanya apakah mereka mengalami peningkatan aset sosial, yang diartikan sebagai mendapatkan jaringan pertemanan dan sosial baru, inspirasi dari pihak lain, fasilitasi, serta akses kepada tokoh berpengaruh di masyarakat atau pemerintah. Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang disurvei yang melaporkan perubahan positif terkait aset sosial.

Balai Sakinah 'Aisyiyah	Posko	Sekolah Perempuan	Balai Perempuan	MUIWO	Serikat PEKKA	Community Center	Kelompok Bunda Kreatif	Seluruh contoh:
60%	74%	60%	73%	45%	86%	9%	85%	61%

Sumber: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Ya/tidak menjawab

Pengalaman interaksi kelompok juga merupakan aspek penting dari contoh-contoh aksi kolektif yang diteliti, sekaligus merupakan faktor yang membangun rasa percaya diri pada perempuan dan menjadi landasan tumbuhnya dukungan sejawat.

Pemberdayaan sosial menunjukkan bahwa aksi kolektif adalah sarana untuk menghubungkan perempuan pada layanan sosial dan pemerintah. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, terlihat bahwa aksi kolektif seperti BSA dengan berbagai bantuan sektoral telah mendekatkan perempuan pada akses layanan kesehatan yang lebih baik. BSA telah mengadvokasi hak perempuan miskin untuk mendapat layanan deteksi dini kanker serta mendapatkan dukungan keuangan. Sementara Sekolah Perempuan mengadvokasi keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan di tingkat desa. Melalui aksi kolektif, keberadaan perempuan menjadi lebih visibel. Artinya, aksi kolektif tampak sebagai jembatan atau penghubung perempuan pada pengampu-pengampu kebijakan.

Melalui aksi kolektif perempuan secara individu maupun kolektif diberdayakan lewat perluasan jaringan. Melalui pertemuan rutin, fasilitasi kelompok, dan interaksi lainnya, terbangunlah saling percaya dan ideologi bersama. Para perantara adalah mentor-mentor utama dari anggota kelompok dan juga langkah pertama mereka menuju ke jaringan yang lebih luas, dan berperan memperkenalkan kelompok kepada para pemimpin, lembaga pemerintah, dan lembaga lain di desa hingga kabupaten, bahkan terkadang tingkat nasional.

Hampir sama dengan BSA, Community Center telah menjadi wadah untuk memaparkan dan menyosialisasikan isu-isu perempuan. Community Center berusaha mengidentifikasi isu-isu kesehatan seksual dan reproduksi di hulu, salah satunya adalah pernikahan anak. Hal ini mencakup advokasi peraturan desa di Desa Pulau Tujuh.

(...) sekarang banyak terjadi pernikahan anak, dan bahkan lebih parah lagi, mereka hamil usia 13 atau 14 tahun. Salah satu upaya para perempuan di APM adalah mendorong

pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencegah pernikahan dini. Dulu kami mengumpulkan para perempuan yang duduk di BPD dan urusan desa, untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang dampak pernikahan anak. Kemudian ketika mereka kembali ke desa masing-masing, mereka mengadakan diskusi di desa-desa mereka, dan mereka berbicara dengan pemerintah desa tentang penerbitan peraturan desa. Peraturan desa tersebut bertujuan untuk mengatasi pernikahan dini. (Fasilitator Lapangan APM Merangin, wawancara kelompok Oktober 2016)

Aksi kolektif semacam ini secara jelas menarget perubahan pada level kebijakan di tingkat desa. Aspirasi ini menjadi tampak dan disorot sebagai persoalan bersama melalui kesatuan aksi kolektif. Inisiatif dan praktik yang dilakukan oleh Community Center menunjukkan bahwa pemberdayaan aset sosial terjadi secara kuat.

Delapan studi kasus menunjukkan dinamika berbeda. Pada aksi kolektif dengan mayoritas atau seluruh anggota berasal dari kalangan elit (memiliki pengaruh besar, memiliki koneksi pribadi pada pengambil keputusan atau secara relatif dianggap cukup kaya—elit dibaca dalam makna yang sepenuhnya positif), pengembangan aspek sosial dirasa sangat signifikan. Pada Balai Perempuan—KPI Cabang Parepare dan Posko Lestari dan Mentari misalnya, aksi kolektif yang dilakukan memberikan fokus untuk memengaruhi hadirnya dan diaplikasikannya kebijakan yang berperspektif perempuan. Kedua kelompok aksi kolektif ini tampak lebih eksklusif dibanding dengan enam studi kasus lainnya. Keduanya lebih berfokus mendorong dan berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan di tingkat desa. Meskipun keanggotaan tampak cenderung eksklusif, namun manfaat dari kerja mereka berdampak dan menyasar secara luas. Posko Lestari dan Mandiri misalnya memberikan manfaat pada perempuan miskin dan perempuan yang mengalami kekerasan.

Sementara KPI Cabang Parepare, secara konsisten mendorong pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang lebih adil dan demokratis yang didasarkan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan, artinya mereka hendak menciptakan lingkungan yang

akomodatif terhadap kesetaraan gender yang lebih besar. Kekuatan KPI berasal dari dedikasi para kadernya, pendidikan ideologi yang berlapis, serta struktur dari tingkat nasional hingga ke tingkat masyarakat kota atau desa. Kader membawa beragam jaringan, dan penyatuannya mereka menjadi suatu kelompok kepentingan semakin memperkuat pengaruh mereka. Perhatian KPI kepada kesadaran politik khususnya tentang pentingnya hak perempuan, serta bagaimana mengakses berbagai layanan kemudian diwujudkan dengan peningkatan aktivisme dan promosi akuntabilitas layanan, setidaknya bagi kelompok-kelompok yang ditemui pada studi kasus ini. Perluasan jaringan untuk isu utama yaitu mempromosikan kesetaraan gender.

Pemberdayaan Melalui Aset Pendukung

Aset pendukung mencakup akses kepada dokumen administratif atau hukum, perlindungan hukum, dan seterusnya. Namun proporsi anggota aksi kolektif yang melaporkan perubahan didalam ranah pemberdayaan ini justru yang terkecil. Dalam survei anggota, para anggota ditanya apakah mereka mengalami perubahan dalam hal kepemilikan dokumen identitas hukum, atau dalam hal perlindungan hukum melalui undang-undang dan kebijakan. Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Proporsi anggota aksi kolektif perempuan yang disurvei yang melaporkan perubahan positif terkait aset pendukung

Balai Sakinah 'Aisyiyah	Posko	Sekolah Perempuan	Balai Perempuan	MUIWO	Serikat PEKKA	Community Center	Kelompok Bunda Kreatif	Seluruh contoh:
0%	42%	25%	27%	0%	43%	0%	15%	18%

Sumber: Survei anggota aksi kolektif (N=169). Ya/tidak menjawab

Beberapa contoh aksi kolektif, khususnya MUIWO dan Kelompok Kreatif Bunda, ditandai dengan adanya fokus pada aset pendukung, seperti status hukum, akses kepada informasi, serta perlindungan hak tenaga kerja. Sementara itu, mitra lainnya menyentuh isu keamanan dan kebebasan individu dari kekerasan, serta akses kepada layanan. Mayoritas contoh menunjukkan adanya berbagai tingkatan kesadaran tentang peraturan yang sangat potensial untuk mendorong terciptanya tindakan dan manfaat yang lebih luas. Sebagai contoh, MUIWO mengadvokasi peraturan tingkat lokal di tingkat kabupaten, yang sekarang sudah selesai, dan tingkat desa tentang perlindungan pekerja migran. Selain itu MUIWO juga memberikan informasi tentang ciri majikan yang baik dan bagaimana menjadi pekerja migran yang aman dan independen. MUIWO berfokus pada advokasi kerja aman bagi pekerja migran, artinya memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kerja yang prosedural agar para migran tidak terjebak pada agen penyalur yang tidak bertanggung jawab.

Kelompok Kreatif Bunda telah menggunakan proses pengumpulan data tentang pekerja rumahan untuk mengadvokasi pengakuan atas keberadaan mereka, sehingga dapat mengakses layanan kesehatan gratis dan mendaftarkan diri ke asuransi kesehatan. Aksi kolektif dalam hal ini membuka kesadaran para

anggotanya tentang pentingnya identitas hukum. Selain itu kelompok-kelompok ini juga membantu anggotanya untuk mendapatkan identitas hukum, seperti yang dilakukan oleh PEKKA. Hal ini dituturkan oleh fasilitator lapangan PEKKA saat wawancara mendalam pada Oktober 2016, "Para anggota Serikat PEKKA dapat mengakses dokumen identitas termasuk akta lahir dan akta nikah secara gratis, dan beberapa kader juga terlibat membantu orang mengakses layanan ini."

Menarik pula bahwa pemberdayaan dari aksi kolektif menyentuh isu sensitif seperti pernikahan dini. Community Center misalnya melalui Aliansi Perempuan Merangin juga telah mengadvokasi penyusunan peraturan lokal untuk mengurangi pernikahan dini, dan juga bekerja menyusun Nota Kesepahaman (MoU) antarlembaga untuk membuat layanan kesehatan seksual dan reproduksi ramah perempuan. Ini mengingat dalam layanan kesehatan dasar, perlakuan terhadap perempuan berbeda.

Sekolah Perempuan dan Balai Perempuan sama-sama bekerja di sektor transparansi dan eligibilitas dalam perlindungan sosial. Kelompok ini melakukan pendataan dan pengawalan atas bentuan beras miskin, memastikan bahwa bantuan sosial menyasar pada kelompok termiskin.

Capaian penting lain ditunjukkan oleh kerja posko yang didukung oleh peraturan desa yang memformalkan perannya dalam menanggapi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu Posko Mentari juga memiliki perjanjian kerja sama dengan dinas sosial untuk kasus penelantaran anak, dinas pendidikan dan sekolah untuk menyosialisasikan tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, dan polres (kabupaten) melalui kepala desa untuk isu-isu terkait hukum.

Pendidikan dan pengetahuan mengenai hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, dan informasi hukum yang diberikan secara konsisten melalui kelompok aksi kolektif ini telah menghasilkan perubahan pada berbagai aspek. Perubahan paling jelas tampak pada aspek kesadaran anggota, penghapusan stigma pada kelompok sosial tertentu, hadirnya mekanisme perlindungan perempuan yang diakui di tingkat desa, perubahan persepsi atas kekerasan dan tumbuhnya kesadaran tentang keberpihakan pada korban. Artinya kerja-kerja aksi kolektif ini tidak hanya bekerja pada tataran konseptual tetapi telah menyediakan juga modalitas perubahan. Seperangkat kebijakan dan penegakan aturan hukum secara jelas telah mengubah konstelasi masyarakat dalam skala tertentu.

Aksi kolektif memiliki pengaruh pada aset pendukung, seperti lingkungan kebijakan, keamanan pribadi dan kebebasan dari kekerasan, serta akses kepada layanan. Dengan demikian aksi kolektif telah memperluas manfaatnya kepada mereka yang langsung terlibat dalam kegiatan maupun mereka yang mencari bantuan. Catatan penting dari temuan ini adalah bahwa perubahan sifat aksi kolektif, dari kegiatan kelompok kecil yang berfokus pada anggotanya sendiri, menjadi berorientasi keluar ke masyarakat luas, serta menjadi bagian dari transformasi yang lebih luas.

Penutup

Aksi kolektif perempuan yang diteliti menunjukkan bahwa semua menerapkan pendekatan kolaboratif. Terdapat spektrum yang luas dari pendekatan yang dilakukan, dari bekerja erat dengan bidang keagamaan dan budaya (seperti Balai Sakinah 'Aisyiyah) hingga pendekatan yang lebih berorientasi kepemimpinan feminis atau hak asasi manusia perempuan (Balai Perempuan dan lainnya). Capaian-capaian yang dilakukan oleh aksi kolektif pada studi kasus menunjukkan, advokasi yang mereka lakukan telah memengaruhi kebijakan dalam skala lokal. Aksi kolektif menarget advokasi kebijakan pada tingkat desa atau maksimal

pada kebijakan daerah (kabupaten). Sesuai hasil riset, penelitian ini tidak menemukan adanya hubungan yang jelas antara kebijakan nasional atau gerakan perempuan nasional di luar hubungan langsung dengan mitra nasional kecuali pada kelompok-kelompok yang berpartisipasi dalam kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.

Delapan aksi kolektif di atas memiliki latar belakang, kondisi sosial, budaya yang berbeda tetapi seluruhnya membagi ide yang sama, yaitu penguatan kapasitas perempuan. Penelitian ini berfokus pada lima aspek pemberdayaan yaitu: aset individu, ekonomi, agensi, sosial dan pelengkap. Signifikansi penguatan aspek-aspek tersebut berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, hal ini tentu terkait dengan tujuan dan pintu masuk tiap kelompok dalam melakukan pemberdayaan. Namun dari seluruh aspek yang diberdayakan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan pada aset manusia/individu adalah dimensi yang mengalami peningkatan paling pesat dan menyeluruh. Pendekatan terstruktur dari PEKKA, KPI, Institut KAPAL Perempuan, dan Yasanti tampak berpengaruh pada perubahan rasa percaya diri dan keyakinan diri perempuan yang kemudian juga meningkatkan aset pemberdayaan mereka. Sementara aspek pemberdayaan yang paling sedikit peningkatannya adalah pada aset pelengkap.

Kedelapan aksi kolektif telah memberdayakan perempuan dalam lima area tematik. PEKKA, KPI dan Sekolah Perempuan-Institut KAPAL Perempuan telah memberdayakan perempuan dengan meningkatkan akses perempuan pada program-program perlindungan sosial pemerintah. YASANTI melalui Perempuan Pekerja Rumahan telah meningkatkan akses perempuan pada peluang kerja. Melalui PPR perempuan diberdayakan dengan cara mendorong pengakuan hak politik dan ekonomi pekerja rumahan perempuan, serta membantu mereka mengakses skema perlindungan sosial yang relevan. MUIWO sebagai aksi kolektif dengan tipe pelibatan submitra yaitu Migrant care telah meningkatkan kondisi migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri. BSA dan Community Center telah memperkuat kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu (maternal) dan reproduksi. Terakhir, Swara Parangpuan sebagai anggota Forum Pengada Layanan bekerja sama dengan KOMNAS Perempuan dalam hal memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan. Aksi kolektif yang diteliti telah meningkatkan akses perempuan pada layanan kesehatan, perlindungan

hukum, pemberdayaan ekonomi, dan melawan stigma buruk terhadap perempuan di dalam masyarakat.

Kedelapan aksi kolektif yang dipaparkan dalam penelitian ini merupakan bagian dari gerakan perempuan di Indonesia. Aksi kolektif adalah bentuk pengartikulasian para perempuan atas kondisi ketidakadilan yang mereka alami. Aksi kolektif adalah gerak strategis dalam merespons bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ia ditandai dengan kesadaran atau kehendak untuk mengorganisasikan diri dan terlibat dalam politik. Aksi kolektif menjadi satu kajian penting dalam isu feminis karena melalui gerak semacam ini perjuangan menjadi lebih kuat, efektif dan juga berkelanjutan. Penelitian ini menemukan bahwa aksi kolektif yang diteliti telah memberdayakan perempuan dalam hal akses terhadap layanan sosial dan perlindungan hukum. Aksi kolektif perempuan yang dipaparkan mendorong tumbuhnya perspektif gender pada individu dan kelompok. Perubahan pada kesadaran menjadi penting karena ini menjadi dasar tindakan kelompok.

Daftar Pustaka

- Abrams, K 1999, "From autonomy to agency: Feminist perspectives on self-direction", *William & Mary Law Review*, vol. 40, issue 3, hh. 805–76.
- Blackburn, S 2004, *Women and the state in modern Indonesia*, Cambridge University Press, United Kingdom.
- Pandolfelli, L, Meinzen-Dick, R & Dohrn, S 2007, Gender and Collective Action: A Conceptual Framework for Analysis, CAPRI Working Paper No. 64.
- Pratiwi, A 2018, "Nani Zulminarni: Perempuan adalah Pelaku Ekonomi", *Jurnal Perempuan: Perempuan dan Ekonomi Perawatan*, vol. 23. no. 4, hh. 143-155.
- Rowlands, J 1997, *Questioning Empowerment: Working with Women in Honduras*, Oxfam, Oxford.
- Wieringa, S 2015, "Gender harmony and the happy family: Islam, gender and sexuality in post-Reformasi Indonesia", *South East Asia Research*, vol. 23, no. 1, hh. 27–44.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
2. Dr. Widjajanti M Santoso (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
3. Ro'fah PhD. (UIN Sunan Kalijaga)
4. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
5. Dr. Atniko Nova Sгиro (Universitas Paramadina)
6. Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
7. Mariana Amiruddin, M. Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH

JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminism dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>

7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

